

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokus Penelian

a. Letak Geografis dan Batas Administratif

Letak penelitian berada di Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Desa Bojongkulur terletak koordinat -6.32 Bujur Timur dan 106.96 Bujur Barat. Desa bojongkulur berbatasan kel. jati rasa kota bekasi, timur: kel. bantar gebang kota bekasi selatan: desa ciangsana kec.

Gunungputri barat, kel. jati luhur kota bekasi. Secara administratif luas Desa Bojongkulur 477,717 Ha luas wilayah secara keseluruhan dengan rincian : Sawah 0 ha, Kebun/pekarangan 223,866 ha, pemukiman rumah 131 ha, jalan umum 43,55 ha, fasos/fasum 80 ha.

b. Jumlah Penduduk

Desa Bojongkulur pada tahun 2018 dengan jumlah penduduknya 32,997, jumlah laki-laki 16,341 dan Perempuan 16,656, jumlah Kepala Keluarga (kk) 10.961 dengan 41 RW dan 219 RT.

Tabel 1 jumlah Penduduk desa Bojongkulur

Tahun	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Permpun
2019	16341	16656

Sumber : Profil Desa Bojongkulur tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui perkembangan jumlah penduduk di Desa Bojongkulur tidak terlalu signifikan. Pada penduduk perempuan berselisih 315 orang di tahun 2018, Dengan banyaknya jumlah penduduk Desa Bojongkulur memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah di Desa Bojongkulur:

Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4Tahun	2.973 orang
2	5-9Tahun	2.752 orang
3	10-14 Tahun	2.396 orang
4	15-19Tahun	2.270 orang
5	20-24Tahun	2.795 orang
6	25-29Tahun	3.412 orang
7	30-34Tahun	3.352 orang
8	35-39Tahun	3.072 orang

9	40-44Tahun	2.445 orang
10	45-49Tahun	2.217 orang
11	50-54Tahun	2.023 orang
12	55-59Tahun	1.392 orang
13	60-64Tahun	993 orang
14	65 Tahun ke atas	904 orang

Sumber : Profil Desa Bojongkulur tahun 2019

Tingkat pendidikan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh faktor akses sarana dan prasaran pada wilayah tersebut. Rata-rata penduduk di perdesaan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibanding dengan penduduk di perkotaan, penduduk desa memiliki tingkat pendidikan rendah karena minimnya sarana dan prasarana. Berikut adalah data tingkat di Desa Bojongkulu:

Tabel 3 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat SD & belum sekolah	3.873 orang
2	BT. SD	3.311 orang
3	Tamat SD	4.654 orang
4	Tamat SLTP	4.601 orang

5	Tamat SLTA	10.935 orang
6	D2	206 orang
7	D3	930 orang
8	S1	3.846 orang
9	S2	531 orang
10	S3	111 orang

Sumber : Profil Desa Bojongkulur tahun 2019

c. Visi Misi Desa Bojongkulur

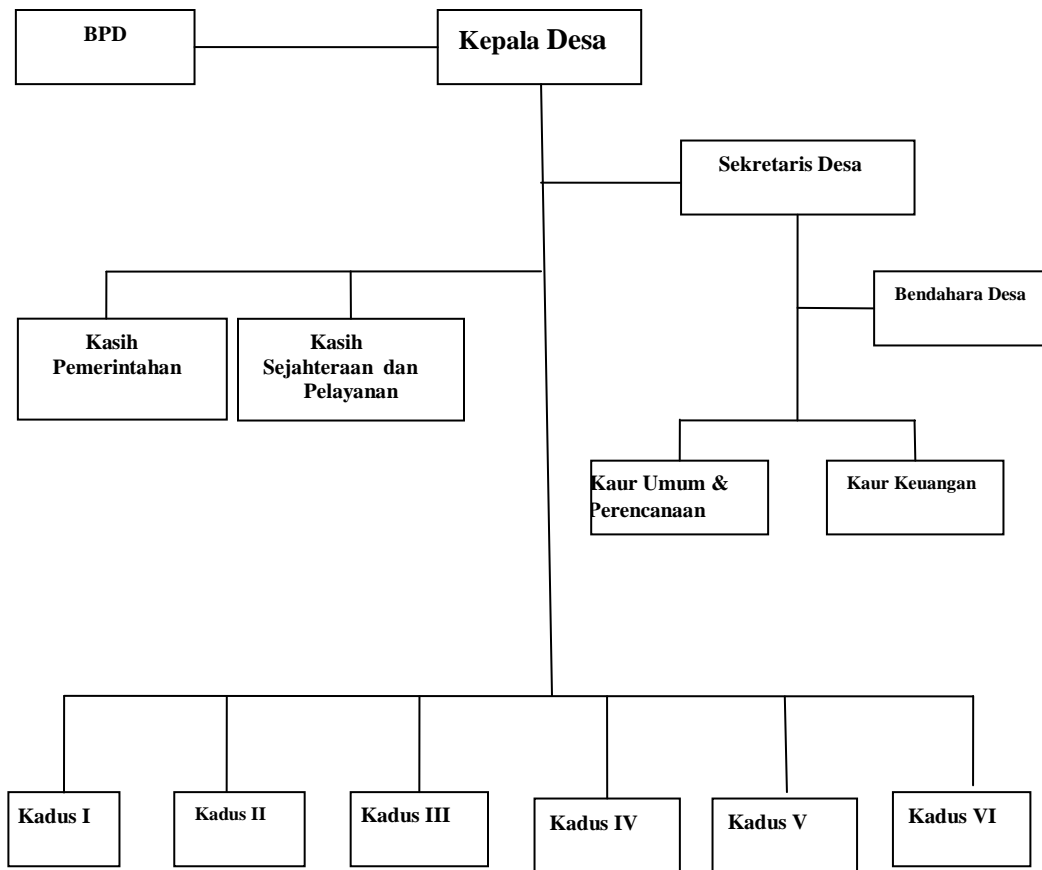
Visi Desa “Menjadi Desa Teladan Di Kabupaten Bogor Tahun 2020”.

Sedangkan Misi Desa Bojongkulur adalah:

- Menciptakan system pemerintahan dan perangkat desa yang efektif, efisien, dan memiliki keunggulan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- Melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, merata dan memiliki keunggulan dalam penataan lingkungan.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mandiri, terdidik dan memiliki keunggulan dalam taraf hidup;
- Menumbuhkan kesadaran hidup bersih-sehat, aman-tertib dan memiliki keunggulan dalam kepribadian sosial.

- Menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang harmonis, saling menghargai dan memiliki keunggulan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

d. Struktur Organisasi



4.2. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Sistem Informasi Desa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Desa Bojongkulur saat ini telah mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Bogor. Untuk melihat pelaksanaan dari kebijakan tersebut maka di lakukan analisis menggunakan teori Edward III dengan indikator, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

A. Komunikasi

Pada sub ini untuk melihat keberhasilan implementasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu : (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan

kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan .

a. Penyaluran (transmisi)

Dalam penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication). Pada variable ini diharapkan melakukan komunikasi secara baik dalam memebrikan sosialisasi sehingga memberikan informasi kepada sasaran kelompok secara tepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

1. Transmisi;

Siatem informasi yang baik merupakan salah kunci keberhasilan dalam membangun komunikasi kepada semua jajaran pemerintahan maupun masyarakat seara umum. Oleh karena itu, ukuran terlaksananya tranmisi dapat kita lihat dari bagaimana implementasi Siatem informasi tersebut diaplikasikan. Sistem informasi baik mampu menghindarkan dari salah pengertian yang berakibat pada tidak terlaksananya tujuan atau kebijakan.

Oleh karena itu, Siatem informasi yang baik akan menyampaikan semua kebijakan kepada masyarakat baik langsung atau tidak lansung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 selaku penanggung jawab sementara kepala desa Bojongsukur mengatakan bahwa :

Informan 1

Dengan adanya sistem informasi itu pak deden yang bertanggung jawab dalam infokom karena itu lebih mudah karena informasi kepada rt,rw, begitu masalah rapat dan sebagaimana bisa liat di infokom itu masyarakat mereka mngetahui kegiatan apasih yang dilakukan pemerintah desa kita lebih terbuka kepada masyarakat, kita muat informasikan kepada masyarakat. banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik itu masalah pemerintahan pembangunan kemudian keagamaan kita informasikan, contoh kemarin dalam suasana sampe skarng covis 19, kita menyamapaikan melalui infokom, kita sebagai masyarakat menggunakan masker cuci tangan, jaga jaran dan lain sebagainya . Sumber : Kamis 6 Agustus 2020 Jam : 09:27

Informan 2

Hal yang sama yang disampaikan oleh informan 2 bapak H. Ariyanto sebagai tokoh masyarakat Desa Bojongkulur :

Bagus, artinya gini nyambung ada keterbukaan baik secara ekonomi, budaya adat dan keagamaan jadi nymabung, tidak ada mis komunikasi semuanya nymabung, Kalau ada intasi rapat di kecamatan kemudian warga di undang rapat ke aula desa ada hal apa yang di sampaikan berkaitan dengan pemerintahan. Sumber : Selasa, 22 September 2020 Jam 13:40

Informan 3

Kalau secara vertikalnya, melalui metsos kalau secara horizontalnya iru kita kordinasi dengan Kadus, Rt ke Rw melalui jejaring watshapp, jd kita ada grup di hanphone itu komunikasi melalui grup WA nanati di sebarin grup-grup warga kepada masyarakat karena memang,pembangunan desa itu sangat tergantung secepat apa informasi.

Informan 4

Sangat baik untuk saat alhmmullah belum ada kendala apa dengan pelaksanaan sistem ini informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui undangan atau inormasi lewat online contohnya wa, web, fb, dll)

Informan 5

Yang sekarang ini, lain dengan dulu, kalau sekarng udah melalui media sosial. Setau saya kalau sekarang, kalau ada kegioatan-kegiatan sementara ini, terbatas karena ada kendala covic 19, cuman kalau sistem informasi kebanyakan di sampaikan di tempa-tempat kumpulan masyarakat atau pengajian-pengajian.

Informan 6

Ada berbentuk aplikasi di kabupaten kalau misalnya sistem informasi kita jkepada msyarakat untuk menyampaikan program-program pemerintah baik pemerinta kabupaten maupun pusat, kita juga membuat baliho-baliho dan ada juga infokom desa. Kadang-kadang kita rapat selain itu juga informasi penting yang berkenaan dengan program tadi, kita langsung melalui kadus itu perangkat desa di tingkat wilayah.

Dari penjelasan dan uraian para informan diatas merupakan butkti bahwa komunikas yang dilakukan oleh pemerintah desa bojong kulur berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena desa bojong kulur selalu memastikan bahwa informasi yang disampaikan selalu tepat dan sesuai dengan arah dari pemerintah (kepala desa) sehingga tidak terjadi miskomunikasi.

2 Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan memang haruslah jelas dan tidak ambigu, dengan demikian setiap implemenatsi kebjjikan sasuai dengan prosedur yang ada. Meskipun demikian, ketidakjelasan informasi terkadang tidak mempengaruhi terhadap kebijakan tertentu.

Oleh karean flekibilitas dalam melaksanakan kebijakan sangat dibutuh agar terjadi iklim komunikasi yang baik dan jelas, serta menghindari keambiguan dari implememtasi setiap kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan dengan informan baik pemangku kebijakan (pemerintrah desa) maupun masyarakat atau tokoh

Informman 1

Ya standar ajalah kalau dibilang memahami masalah ini ya kita pahami lah
kalau kita memahami manfaatnya itu paham
Ya sangat jelas
Kalau kendala mungkin alat aja ya, walaupun kita ini desa mandiri tetap
kendala itu ada

Informman 2

Iya memahami kebijakan SID ini
Iya sangat jelas
Kendalanya tidak ada

Informman 3

Tentunya harus memahami supaya informasi itu sampai kepada masyarakat.
Iya pasti di pahami, klu tidak di pahami nanti ada grup nanti di pertanyakan di
grub aja.
Kadang-kadang kendalanya masyarakat tentunya juga responya kadang-
kadang mereka sibuk kerja dan tidak menyimak yang kita sampaikan.

Informman 4

Kalau kita untuk itu sih pahan juga.
Iya malahan sekarang ini lebih cepat walaupun masyarakat ada yang
menggunakan metsos atau tidak tetap di informasikan.
Salah satu diantaranya mungkin koata ya, soalnya sekarang ini ka ada covid
jadi terkendala

Informman 5

Kita juga kurang sepenuhnya menrti karena kita bukan di birokrasi, kita
hanya di keagamaan.
Yah pasti di mengertilah sedikit-sediktlah.
(kalau kendala gak ada, karena kalau kepala desa tidak ada itu ada pak kadus,
diturun langsung ke masyarakat.

Dari data wawancara dengan para informan manunjukkan bahwa kejelasan
dalam penyampian informasi sudah jelas dan metode yang digunakan oleh para
pemerintah dan perangkat desa menunjukkan kometmen terhadap upaya memberikan

peyalanan terbaik agar terhindar dari salah informasi (miskomunikasi dan *misunderstanding*).

2. Konsistensi

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah harus konsisten dan jelas sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan kebingungan bagi pelaksana tugas. Dalam artian bahwa perintah yang diinstruksikan harus jelas dan tidak berubah setiap saat. Hal tersebut akan memberikan efek yang baik dan efektif bagi lingkungan pemerintah dan masyarakat bisa menjalankan intruksi dengan jelas tanpa ada keluhan. Berikut hasil wawancara dengan para informan:

Informman 1

Karena kita ini pelayana masyarakat, walaupun kita ini keterbatasan perangkat jadi tidak harus ketemu dengan bapak A meudian besok dengan pabak B itu tidak mengurangi pelayana kepada masyarakat,selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat terutama kepada rt,rw, dalam menyampaikan informasi atau pelayanan kami mengundang mereka secara bergantian karena kondisi tidak memungkinkan pada saat ni Karen covid 19dan komunikasi seperti itu semuanay merata.

Informman 2

Iya kalau saya pribadi itu komunikasi yang di sampaikan kepada masyarakat itu rutin dan sesuai perintah atasan juga sesuai dan arahan baru disamapaikan kepada masyarakat.

Informman 3

Iya secara rutin, jadi kita setiap ada informasi langsung melalui grup wa pengurus rt, rw, itu ada karena masing-masing lingkungan juga memiliki grup wa juga.

Informman 4

Iya rutin, jadi misalnya yang lagi ramenya bansos itu cepat sekali informasinya.

Informman 5

Jadi gini, kalau mereka bagian eksekutif ya contoh BPD nyambunya lewat rapat mingguan

Penyampain informasi yang baik harus dengan konsisten sehingga tidak menimbulkan *misunderstanding* yang menimbulkan kesalahpahaman diantara pejabat, perangkat dan juga masyarakat secara luas. Menurut data wawancara dengan para informan maka konsistensi yang dilakukan oleh para pejabat dan perangkat desa bojong kulur cukup baik sehingga terhindar miskomunikasi baik diantara pejabat, perangkat dan masyarakat di desa bojong kulur.

B. Sumber daya

1 Staf

Staf merupakan element terpenting dalam mencapai pola komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan intruksi yang berlaku. Keberadaan staf yang mempuni dan kompeten pada bidangnya akan mendorong pemerintahan yang efektif serta efisien, terutama dalam membangun komunikasi dan interaksi yang baik bagi seluruh element pemerintah lebih terhadap masyarakat luas. Berikut hasil wawancara dengan para informan;

Informman 1

Kalau disinikan di bidangin oleh pelayanan, saya sendiri sebagai pelayang PAK deden, lalu kita memalui sistem yang ada artinya pola komunikasi pemerintah desa itu melalui perangkat wakil kepala desa lingknag itu ada kadus menginformasikan ke RT masing-mmasing ke Rw selanjtnya menginformasikan ke warganya, adapun secara umum kita sediakan media informasi melalu WEBSITE dan media-media social lainntnya seperti misalnya istagram, facebook, dan lain-lain sebagainya.

Informman 2

Kebutuhan pak deden yang penanggung jawab trus klu jenjangnya kepala desa trus saya juga.

Keberadaan staf dalam upaya membangun komunikasi yang baik antara perjabat dan masyarakat luas sangat penting kerana hal ini menjadi salah satu factor terjadinya komunkasi yang baik dan benar. Oleh sebab itu, data wawancara dengan para informan menunjuk bahwa para staf bekerja dengan baik dan solid bahkan melibat para art dan rw.

2. Dana

Dalam melakukan sebuah kebijakan tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang mempuni dan kompeten, akan tetapi juga membutuhkan sember daya lainnya atau bisa kita sebut dengan sumber daya materi terutama dana akomodasi.

Dana meruapakan factor penting agar bisa membuat semua kebijakan yang berhungan dengan program pemerintah bisa tercapai. Oleh karena itu keberadaan dana menentukan berjalan atrau tidaknya sebuah program. Berikut hasil wawancara dengan para informan;

Informan 1

Kita sudah anggarkan APBDes, dan itu tidak mengganggu ADD dan kita mngambil dari PAD berdasarkan peraturan desa dan pihak ke 3 yang tidak memikat.

Alhmdullah cukup karenan sudah di anggarkan.

Informman 2

Kalau dana sendiri itu jelas semua kebijakan pemerintah itu harus didasari atas alokasi yang sudah di tetapkan, artinya sudah masuk RKP dan itu semuanya dan yang bersumber dari APBDES.

Kalau bicara cukup gak cukup sesuai kebijakan kalau dibilng cukup belum kalua di bilng gak cukup ya namanya pengembanagan SID kebutuhan dilapangan, artinya kebijakan pemerintah ya kita cukupin aja.

Keberadaan dana dalam upaya meniungkat kualitas pelayan terhadap msayarkat sangat penting, sehingga dengan demikian komunikasi dan sosialisasi berjalan lancer sesuai dengan yang diharapkan. Menurut data wawancara denga para informan diatas dapat disimpulkan bahwa keradaan dana cukup untuk membangun dan mengembangkan sistem infomasi desa.

3. Informasi

Dalam melaksanakan kebijakan informasi merupakan yang tidak kita pungkiri, sebab dengan adanya informasi maka kebijakan yang dibuat akan bisa implementasikan dengan baik dan susai dengan arahan pamangku kebijakan. Informasai mempunyai dua bentuk, pertama informasi yang berhubungan langsung dengan tata cara pelaksanaan kebijakan. Ke dua informasio berhungan dengan

menganai data terlaksananya sebuah kebijakan dan juga kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan sesuai tata cara yang telah ditetapkan. Ada dua pola Penyampaian informasi kepada staf dan masyarakat yang sering dilakukan oleh pemerintah, pertama secara langsung dalam hal ini pemerintah atau pemangku kebijakan menyampaikan secara langsung baik secara tertulis (surat resmi) maupun secara secara lisan. Kedua secara tidak langsung informasi dalam hal ini pemerintah atau pemangku kebijakan menyampaikan intruksi atau informasi melalui media seperti website dan juga baliho. Berikut hasil wawancara dengan informan;

Informan 1

Melalui infokom dan rapat
Surat edaran

Informman 2

Menginformasikan melalui wa,ig,fb dan lain-lain.
Ya sudah cukup banyak juga untuk menginformasikan melalui media contohnya kaya grup-grup begitulah.

Informman 3

Ada web desa, trus ada juga baliho-baliho dan grup-grup wa
Iya ada beberapa contohnya surat balihon dang dan grup wa

Informman 4

Melalui medsos.
Kalu untuk sementara ini sangat cukup.

Informman 5

Melalui rapat mingguan juga melalui grup-grup wa dan lain-lain.
Mungkin yang sya tau ada baliho grup wa fb dan medsos lainnyalah.

Informasi adalah salah factor yang menunjukkan terjalannya komunikasi yang baik antara pejabat, perangkat dan masyarakat di desa bojong kulur. Menurut wawancara dengan para informan diatas bahwa ketejalin informasi menunjukkan adanya komitmen baik dari setiap lapisan pejabat pemerintah bojong kulur bahkan untuk menunjang hal tersebut pemerintah berusaha menghimpung semua tokoh masyarakat dan memberi fasilitas berupa hp.

4. Wewenang

Dalam menentukan kebijakan kewenangan pemerintah menjadi penting sebagai legitimasi terhadap semua bentuk kebijakan yang dilaksanakan agar terhindar dari kesalahan dan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan tidak terlaksananya sebuah kebijakan. Dengan adanya wewenang maka akan menghindarkan dari kerancuan, ketidakefektifan, dan cenderung disalah gunakan. Berikut ini hasil wawancara dengan informan;

Informan 1

Kami membentuk tim untuk melaksanakan hal ini sesuai aturan di desa bojongkulur ini.

Tidak ada.

Informman 2

Kami membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam hal ini dilaksanakan oleh kepala urusan itu sendiri dan untuk dijawab sendiri kita saat ini sistem infortmasinya juga di kembangkan melalui sistem aplikasi sapa warga sehingga membantu pemerintah desa dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dari pemerintah daerah, jadi jalur informasi

desa ini di dukung oleh anggaran yang ada karena setiap rw itu memiliki satu hp, itu bantuan dri pemprof melalui APBDES.

Pemerintah harus ambil bagian penting dalam membangun komunikasi yang satu arah dalam artian pemerintah harus memegang komando agar komunikasi sejalin satu arah dan menghindari adanya kekacauan dalam memberi.

5. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana material atau fisik untuk menunjang terlaksananya semua bentuk kebijakan. Keberadaan fasilitas fisik seperti computer, handphone, akan mempermudah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan semua kebijakan terutama berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana kita ketahui computer dan handphone adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem informasi dan komunikasi. Berikut ini wawancara dengan informan;

Informan 1

Fasilitas yang kita punya seperti laptop, computer dll, klu di bilang memadai In syaa ALLAH.

Informman 2

Untuk Bojongsukur sendiri salah satu desa perkotaan jadi, informasi sendiri In shaa ALLAH sudah cukup karena masyarakat hampir rata-rata memiliki smartfont, jadi mereka bisa mengakses informasi – informasi teraktuan dan terabdnet

Informman 3

Memang sih masih belum maksimal kita tetap berusaha melakukan perbaikan-perbaikan setiap priodiknya jadi sekarang memanfaatkan yang ada dulu.

Dalam penyampain Informen diatas bahwa fasilitas di Desa bojongkulur sendiri terbilang sudah memadai dikarenakan fasilita yang digunakan bisa mengakses informasi-informasi yang harus masyarakat dapatkan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam kantor desa tersebut.

3. Disposisi

Menurut Edwar III disposisi bisa dikataka sebagai keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksakannya secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan

bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1). Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pad kepentingan warga masyarakat.

2). Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Berikut ini hasil wawancara informan;

Informan 1

Sangat efektif mendapat sambutan bagus.

Dalam komitmen pelaksanaan ini program-program yang ada itu sudah di teragnakan.

Kalau pembagian itu sudah sesuai dengan kahliannya masing-masing, jadi tidak lagi siapa yang siap atau tidak.

Ya kita arahkan sesuai protokol yang sudah kami laksanakan.

Informman 2

Sangat bagus karena liat dari aspek efektifitas dalam penyampaian informasi itu lebih cepat lebih actual dan masyarakat tidak perlu mencari kemana cukup akses jaringan sistem informasi desa b itu bsa melihat apa yang menjadi informasdi informasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Komitmen sendiri itu di tuankan program-program yang ada artinya tanpa di atur itu sudah teragendakan karena sistem informasinya sudah mengikuti alur kegiatan pembanguna desa, sehingga ketika ada pelakasanaan pembangunan desa otomatis berita-berita atau informasi itu kita sebarakan melalui jejaring social.

Mungkin di keklolah oleh HUMAS Desa itu lebih ke INFOKOM jadi informasi komunikasi dia yang bertugas untuk menyebarkan atau membagikan informasi-informasi itu baik memalui kepala dusun, secara otomatis akan menyebarkan warga melalui rt,rw.

Jadi dalam pelaksanaan ini kita sebagai kebijakan pasti mengarahkan sesuai pelaksanaan yang ada dalam kebijakaan ini.

Informman 4

Samapi sekarang ini tidak ada kendala.

Mengkin kembali ke si pembuat kebijakannya, tapi selam ini sih setiap kebijakan yang di samapaikan melalui media informasi ini alahmdullah selalu sepaham dan sepakat.

Dalam mengerjakan perintah atau tugah bahwa di Desa Bojongkulur sudah terlihat kebijakannya yang suda disampaikan informen itu sudah terarah atau suda satu frekwensi dalam bidang tersebut, perkembangan zaman yang semkain maju dan adanya medernisasi teknologi yang berpengaruh dalam urusan administrasi dalam kantor desa tersebut sesuai dengan keahlian pegawai dalam kantor desa tertentu

4. Struktur organisasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), 23” Standard operational procedure (SOP) merupakan

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya

terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

1. Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyerangan dalam organisasi kerja yang kompleks yang luas. (Winarno, 2005 :150). Ukuran dasar Standar Operational Procedure atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum berbagai sector public dan swasta. Dengan menggunakan Standard Operational Procedure, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan dan keamanan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005;152) menjelaskan bahwa: Standard Operasional Procedure”sangat mungkin dapat kendala bagi implementasi kebijakan yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakn-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas Standard Operasional Procedure menghambat implementasi. Namun demikian, disamping penghambat implementasi kebijakan Standard Operasional Procedure juga mempunyai manfaat. Organisa-

organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luas dan control yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai cirri-ciri seperti ini:

Berikut ini wawancara dari informan :

Informan 1

Kesulitan saat ini paling dari fasilitas yang belum memadai namun kita optimalkan perangkat informasi yang ada seperti misalnya handphone/leptop/computer baru sebatas itu saja adapun media-media yang lain masih dalam melelengkapilah

Mekanismenya kita setiap ada kegiatan APDes terutama pembangunan atau kegiatan-kegiatan yang berada di di kantor desa Yyang sudah terjadwal dalam agenda kita informasi kita foto narasi dan beritanay baru kita ditribusi melalului media-media social yang ada atau yang dimiliki oleh desa.

Informman 2

Gak ada kesulitan sekarang ini, karena memang kepala desa, membagikan setiap ketua atau kepala, contionya saya ketua keagamaan di kasi hp, begitu juga tokoh msyarakat, dan rt,rw.

Sebuah lembaga atau organisasi tentu standar oprasional dalam melakukan program kerkja sangat penting, agar menghindari kesalahan yang mendasar dalam melakukan tindakan atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam kasus SID ini sop berfungsi untuk mengedalikan dan memberikkan arahan kepada para pejabat/pemerintah dan atau staf dalam menyampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat seusai informasi yang ada (sesuai SOP). Sehingga dengan adanya sop tersebut kesalahan dalam SID dapat diminimalisir dan menghidari miskomunikasi antara pejabat kepada staf serta masyarakt secara menyeluruh.

2. Fragmentasi

Edwar III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakn, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyaknya lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekwensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan imolementasi kebijakan.

Berikut ini hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan public (budi Winarno, 2005:153-154):

Pertama; Tidak ada otoritas yang kuat dalam implemtasi kebijakan karena terpercayanya funfisi-fungsi tertentu kedalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan kedalam berbagai anugrah birokrasi yang menumpuk.

Kedua; pandang yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan mementang kebijakan-kebijakan baru:

Beriku ini hasil wawancara informan

Informman 1

Kordinasi sendiri secara otomatis karena kegiatan itu sudah terskejul RKKD dari perencanaan pembangunan desa itukan sudah ada garis besarnya sehingga pada saat grup pelaksanaan kegiatan dimana otomatis dari bagian HUMAS atau INFOKOM terjun ikut juga mengdokumentasikan kegiatan informasikan kepada msyarakat.

Informman 2

Setiap ada kegiatan kita rapat seminggu sekali jadi lapora-laporan di kordinasikan dipimpinan, kalau memang bagus di pertahankan kalau tidak bagus diganti.

Informman 3

Jadi gini kalau untuk kepala desa, untuk membetulkan warga masyarakatnya, jadi informasi apapun itu selalu diberitahukan ke masyarakat, dan skrng ini masyarakat dan aparatur desa ini harmonis sekali.

Dalam pemerintahan atau organisasi fragmentasi adalah yang lumrah dan penting agar pemebagaiann tugas dan fungsi berjalan dengan maksimal atau bisa kita sebut dengan pembagian *job desk* sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh karena itu koordinasi yang baik akan menciptakan iklim kerja baik pula serta dapat mencegah adanya miskomunikasi. Dari hasil wawanacara di atas peneliti berkesimpulan bahwa dalam menjalankan SID desa Bojong Kulur sudah cukup baik, tepat dan sesuai dengan sop yang telah dibuat oleh pemerintah desa.

4.3. Hasil Dan Pembahasan

Sistem informasi desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya ditingkat desa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/menyebarkan informasi.

SID merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat desa, dikembangkan oleh pemerintah daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat daerah. SID dikelola oleh pemerintah desa secara *offline* dan *online*.

SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan

SID secara harfiah merupakan salah satu desa bojongkulur melakukan komunikasi koordinasi, dan disposisi serta implementasi terhadap semua keputusan dan kebijakan pemerintah desa dan atau memberikan informasi atas seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan kepada seluruh elemen masyarakat melalui staf atau perangkat desa. Ada dua pola komunikasi yang dilakukan pertama bersifat langsung yang kedua bersifat tidak langsung. Selain itu komunikasi koordinasi bisa dilakukan secara online ataupun offline.

Koordinasi secara online berarti bahwa komunikasi dan koordinasi yang mereka lakukan menggunakan platform media sosial atau media chatting seperti WA grup, facebook, google meet dan zoom meeting. Tidak hanya itu bahkan pengaduan masyarakatpun dengan adanya sid ini bisa dilakukan secara online melalui pesan singkat whatsapp atau sms yang telah disediakan oleh pemerintah desa.

Komunikasi atau koordinasi yang dilakukan secara offline berarti dapat kita sebut dengan rapat bulanan, mingguan dan lain sebagainya. Dan masyarakat bisa datang langsung ke kantor desa atau masyarakat bisa melalui rt, rw dan kadus terkait.

4.3.1 Komunikasi

Pada indikator komunikasi dalam suatu kebijakan publik merupakan hal penting dilakukannya dengan komunikasi dengan baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tahapan komunikasi yang terdapat pelaksanaan Sistem Informasi Desa ini dimulai dengan persiapan sampai tahap pelaksanaan.

Komunikasi yang dilakukan kepada panitia kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan bentuk Wa, Fb, Ig dan juga ditambah dengan Balihon dan poster, selain itu panitia juga melaksanakan tidak ketentuan waktu rutin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan sosialisasi terhadap semua perkembangan program desa atau kegiatan desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan atau menyampaikan pendapatnya terhadap program yang desa laksanakan. Pola komunikasi seperti ini bisa melalui berbagai media pertama melalui WA grup, Fb dan lain-lain (komunikasi online via media sosial), yang kedua melalui surat edaran resmi dari kepala desa atau pejabat desa terkait program dan kegiatan desa. Yang terakhir melalui balihon atau poster yang ditempe atau dipajang di tempat-tempat umum agar masyarakat bisa langsung tau dan menjalankan segala bentuk instruksi atau imbauan dari pemerintah desa.

Gambar 4.1



fb:desabojongkulur

Contoh: Media komunikasi publikasi Desa bojong kulur terkait covid 19

Bagi Desa bojong kulur sid merupakan sistem yang sudah terintegrasi dan mapan. mengapa demikian, karena dengan sid ketersampain informasi terhadap masyarakat berjalan dengan baik dan merata sehingga keterlaksanaan kebijakan bisa lebih cepat dan dapat menghindari adanya misinformasi dan miskomunikasi antara sesama staf dan perangkat desa.

Adapun bagi masyarakat secara luas ketersediaan informasi lebih mudah didapatkan serta masyarakat mampu menyerap secara baik dan benar hal ini merupakan hasil kerja keras pemerintah desa yang mampu mengakomodir tokoh masyarakat termasuk rt, rw ikut dalam partisipasi penuh program sistem informasi desa yang disingkat deng SID.

Gambar 4.2



Foto : Dokumen Pribadi

Dokumentasi bentuk pelayanan konsultasi tatap muka yang dilakukan masyarakat kepada Pemerintah Desa Bojong Kulur

4.3.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang baik yaitu, sumber daya manusia, sumber daya dana dan fasilitas-fasilitas yang tersedia didalam sistem informasi tersebut. Sumber daya manusia yang tidak memadai akan berakibat pada pelaksanaan program terhambat. Jika jumlah peksaaan terbatas maka yang harus ditingkatkan adalah kemampuan para pelaksana untuk menerapkan sistem informasi desa.

Keberadaan sumber daya yang baik akan menentukan hasil kinerja yang baik juga. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya yang baik dan benar memberikan pengaruh besar terhadap berjalannya sebuah lembaga atau organisasi. Sumber daya

organisasi atau lembaga dibagi menjadi dua, pertama sumber daya manusia atau staf, kedua sumber daya materi atau dana.

Sumber daya manusia akan menentukan roda berjalannya sebuah organisasi atau lembaga. Dalam penelitian ini yang dimaksud lembaga atau organisasi adalah desa bojongkulur. Pemanfaatan sumber daya manusia di desa bojongkulur menurut hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa seluruh element masyarakat terutama rt,rtw, dan tokoh masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun komunikasi yang baik dalam organisasi desa, Sehingga meminimalisir terjadinya miss komunikasi dan salah pengertian antara pejabat, staf, dan masyarakat secara umum. Tidak hanya itu adanya fasilitas (hp kepada rt,rw, dan tokoh masyarakat) yang diberikan oleh pemerintah setempat semakin mempermudah komunikasi diantara para pejabat staf dan masyarakat luas.

Selanjutnya sumber daya materi (dana) merupakan kebutuhan primer agar sumber daya manusia atau staf bisa bekerja secara maksimal dalam artian bahwa keberadaan dana atau anggaran yang tepat sangat menentukan akan terlaksananya kebijakan dan program desa. Desa bojongkulur sendiri sejauh ini dan SID masih terbatas penganggarnya atau masih bergantung pada ADD dan PAD dan pihak ketiga yang tidak memikat.

Oleh kerana itu anggaran dana SID selama ini tidak memiliki dana tetap dalam membiayai segala program sid. Keterbatasan biaya tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja para staf dalam melaksanakan program meskipun demikian kegiatan sid tetap berjalan dengan baik ditengah keterbatasan biaya operasional.

4.3.4 Disposi

Tolak ukur terjadinya kerjasama antara pejabat dan staf adalah adanya sinergi yang baik dan komunikasi yang baik juga. Tidak hanya itu pejabat dan staf memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta adanya komitmen untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu, disposisi merupakan hal yang utama dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam hal pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID). SID akan berjalan dengan baik jika para pembuat kebijakan mampu bertanggung jawab dan menjaleskan dengan baik kepada para staf secara baik dan benar. Tidak hanya itu para staf juga harus mempunyai tanggung jawab sama dengan para pejabat sehingga setiap akan berimplikasi pada setiap kebijakan dan semua kebijakan akan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Bojongsukur merupakan salah satu desa yang saat ini, menjadi tolak ukur desa dengan penggunaan SID yang baik dan benar meskipun memiliki beberapa kekurangan. Desa Bojongsukur telah menerapkan SID serta menjadikan SID salah satu sistem yang dapat menghubungkan semua elemen masyarakat, mulai dari kepala desa, staf, RT/RW, Tokoh hingga masyarakat umum. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintah desa dalam upaya memaksimalkan SID. sehingga SID berjalan dengan baik tentunya juga komitmen semua aparatur desa serta tokoh masyarakat sehingga menghasilkan komunikasi dan koordinasi yang baik dan benar.

4.3.3 Struktur Organisasi

Menurut Edwar III (dalam Agustino, 2008:153-154), yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

4.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati 68 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Dikabupaten Bogor

1.4.1 Faktor Pendukung

1. Adanya standard an tujuan yang tercantum jelas pada regulasi
2. Adanya prosese transmisi kebijakn lewaat pelatihan operator SID tingkat desa
3. Jesalnya Informasdi yang diberikan pada waktu pelatihan
4. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan seragam
5. Respon berupa penerimaan yang baik dari para pelaksana kebijakan
6. Adanya komitmen atau upaya untuk melaksanakan kebijakan.

1.4.2 Faktor Penghambat

1. Tidak adanya ketentuan berupa sistem *reward& punishment* yang membuat operator desa kurng aktif mengelola SID

2. Kurangnya kualitas dan kemampuan operator SID
3. Keterbatasan sumber daya ditingkat kabupaten
4. Kurang meratanya infrastruktur akses layanan internet ditingkat desa
5. Kurangnya insentitas atau jumlah pelatihan dari pihak kabupaten bagi operator SID